



EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DAERAH PERBATASAN

EFFECTIVENESS OF PUBLIC POLICY IMPLEMENTATION IN INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT IN BORDER AREAS

Martinus Wika

STISIPOL Yaleka Maro Merauke

Email: martinuswika202@gmail.com

Abstract

Article history :

Received : 25-01-2025

Revised : 27-01-2025

Accepted : 29-01-2025

Published : 31-01-2025

This study aims to analyze the effectiveness of the implementation of infrastructure development policies in border areas by identifying inhibiting factors and solutions that can improve the success of the policy. This study uses a qualitative approach with a case study design to deeply understand the challenges and dynamics faced in implementing policies in border areas that have unique geographic and social conditions. Data were collected through in-depth interviews with government officials, project implementers, and local communities, as well as field observations and documentation studies. Thematic analysis was used to identify key themes related to inhibiting factors and solutions in policy implementation. The results of the study indicate that the implementation of infrastructure development policies in border areas faces various significant challenges, such as budget constraints, lack of coordination between related agencies, and limited human resource capacity. In addition, geographical factors that are difficult to reach and socio-cultural barriers also worsen the process of implementing the policy. However, positive achievements are also seen in the development of basic infrastructure that has improved accessibility and the quality of life of local communities. This study recommends that policy makers formulate strategies that are more inclusive, based on local contexts, and prioritize community participation in policy planning and implementation. With a more holistic approach, it is hoped that infrastructure development in border areas can run more effectively and have a positive impact on community welfare.

Keywords: *Effectiveness of Policy Implementation; Infrastructure Development; Border Areas*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur di daerah perbatasan dengan mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan solusi yang dapat meningkatkan keberhasilan kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk memahami secara mendalam tantangan dan dinamika yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan di wilayah perbatasan yang memiliki kondisi geografis dan sosial yang khas. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pejabat pemerintah, pelaksana proyek, dan masyarakat setempat, serta observasi lapangan dan studi dokumentasi. Analisis tematik digunakan untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang berkaitan dengan faktor penghambat dan solusi dalam implementasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur di daerah perbatasan menghadapi berbagai tantangan signifikan, seperti keterbatasan anggaran, kurangnya koordinasi antar instansi terkait, serta terbatasnya kapasitas sumber daya manusia. Selain itu, faktor geografis yang sulit dijangkau dan hambatan sosial budaya juga turut memperburuk proses implementasi kebijakan tersebut. Meskipun



demikian, pencapaian positif juga terlihat dalam pembangunan infrastruktur dasar yang telah meningkatkan aksesibilitas dan kualitas hidup masyarakat setempat. Penelitian ini menyarankan agar pengambil kebijakan merumuskan strategi yang lebih inklusif, berbasis pada konteks lokal, dan mengutamakan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan. Dengan pendekatan yang lebih holistik, diharapkan pembangunan infrastruktur di daerah perbatasan dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci : Efektivitas Implementasi Kebijakan; Pembangunan Infrastruktur; Daerah Perbatasan

PENDAHULUAN

Pembangunan infrastruktur di daerah perbatasan merupakan salah satu aspek krusial dalam mewujudkan pemerataan pembangunan yang adil dan merata di seluruh wilayah negara (Nursyahrani et al. 2025). Daerah perbatasan, yang umumnya menghadapi tantangan besar terkait aksesibilitas, keterbatasan sumber daya, serta fasilitas yang belum memadai, sering kali menjadi wilayah yang terpinggirkan dalam proses pembangunan nasional. Keterbatasan ini tidak hanya memengaruhi kualitas hidup masyarakat setempat, tetapi juga menghambat potensi ekonomi dan integrasi daerah perbatasan dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur yang memadai, seperti transportasi, energi, telekomunikasi, dan penyediaan air bersih, menjadi faktor penentu dalam mempercepat pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya (Zulhija and Benardin 2025). Oleh karena itu, efektivitas implementasi kebijakan publik dalam pembangunan infrastruktur di daerah perbatasan perlu dievaluasi untuk memahami sejauh mana kebijakan tersebut mampu menjawab tantangan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Pemerintah pusat, melalui berbagai kebijakan pembangunan, telah berupaya untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antara daerah perbatasan dan daerah pusat. Kebijakan tersebut mencakup proyek pembangunan infrastruktur jangka pendek maupun jangka panjang yang dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup dan memperkuat konektivitas antar wilayah. Infrastruktur yang baik tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperbaiki aksesibilitas pendidikan, kesehatan, serta memperkuat stabilitas sosial (Lase et al. 2024). Namun, meskipun kebijakan tersebut telah dirancang dengan matang, pelaksanaannya seringkali terhambat oleh berbagai kendala, seperti keterbatasan anggaran, kurangnya tenaga profesional di daerah terpencil, dan tantangan geografis yang sulit dijangkau. Faktor-faktor ini sering menyebabkan ketidaksesuaian antara rencana dan hasil yang tercapai di lapangan, yang pada gilirannya mempengaruhi keberhasilan kebijakan tersebut dalam mencapai tujuan yang diinginkan.

Masalah yang dihadapi di lapangan terkait implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur di daerah perbatasan antara lain adalah terbatasnya anggaran yang dialokasikan, yang seringkali tidak sebanding dengan kebutuhan pembangunan yang sangat besar di wilayah tersebut. Selain itu, tantangan geografis yang sulit dijangkau, seperti medan yang berbukit atau terisolasi, juga menghambat pembangunan infrastruktur yang memadai. Keterbatasan sumber daya manusia, baik dalam hal jumlah maupun kompetensi tenaga kerja lokal, turut memperburuk pelaksanaan proyek-proyek pembangunan. Masyarakat setempat yang sering kali belum sepenuhnya terlibat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, ditambah dengan kurangnya koordinasi antar lembaga pemerintah pusat dan daerah, memperburuk efektivitas kebijakan tersebut. Semua faktor ini menyebabkan kesenjangan antara perencanaan kebijakan dengan hasil yang dicapai di lapangan, yang berdampak pada lambatnya perkembangan infrastruktur dan kurang optimalnya manfaat yang dirasakan oleh masyarakat perbatasan.



Kesenjangan penelitian dalam konteks efektivitas implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur di daerah perbatasan terletak pada kurangnya studi yang secara mendalam mengidentifikasi faktor-faktor penghambat yang spesifik, baik di tingkat perencanaan maupun pelaksanaan kebijakan. Banyak penelitian sebelumnya yang fokus pada kebijakan pembangunan infrastruktur secara umum, namun belum banyak yang membahas secara komprehensif mengenai tantangan dan kendala yang dihadapi di daerah perbatasan, terutama terkait dengan keterbatasan sumber daya, aspek geografis, dan koordinasi antar instansi. Selain itu, penelitian yang ada cenderung lebih menitikberatkan pada daerah perkotaan atau pusat-pusat ekonomi, sementara daerah perbatasan yang memiliki karakteristik unik dan kompleksitas tersendiri, masih jarang menjadi fokus utama penelitian. Oleh karena itu, terdapat kebutuhan untuk mengisi kesenjangan ini dengan melakukan penelitian yang lebih spesifik dan kontekstual mengenai efektivitas implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur di daerah perbatasan, serta mengidentifikasi solusi yang relevan untuk meningkatkan keberhasilan kebijakan tersebut.

Urgensi penelitian ini sangat penting mengingat pembangunan infrastruktur di daerah perbatasan memiliki dampak yang signifikan terhadap integrasi sosial, ekonomi, dan politik antara wilayah perbatasan dan pusat. Infrastruktur yang memadai dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta memperkuat ketahanan wilayah dalam menghadapi tantangan global dan domestik. Namun, pelaksanaan kebijakan pembangunan infrastruktur di daerah perbatasan sering kali menemui kendala yang belum sepenuhnya teridentifikasi dan diatasi, seperti masalah aksesibilitas, keterbatasan sumber daya, dan koordinasi antar instansi yang kurang efektif. Penelitian ini sangat mendesak untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kebijakan tersebut, serta mengidentifikasi solusi praktis yang dapat diimplementasikan. Hasil dari penelitian ini akan menjadi referensi penting bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan kebijakan yang lebih efisien, inklusif, dan sesuai dengan kebutuhan spesifik daerah perbatasan, sehingga dapat mempercepat pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan yang lebih mendalam dan kontekstual terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur di daerah perbatasan. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus pada daerah perkotaan atau pusat pertumbuhan ekonomi, sementara daerah perbatasan yang memiliki tantangan geografis, sosial, dan ekonomi yang unik belum banyak dieksplorasi. Penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan meneliti hambatan-hambatan spesifik yang dihadapi daerah perbatasan dalam implementasi kebijakan infrastruktur, seperti isu koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, serta aspek kultural dan sosial yang mempengaruhi partisipasi masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga memperkenalkan perspektif baru dengan mengkaji kolaborasi antara sektor publik dan swasta dalam pembangunan infrastruktur di daerah perbatasan, yang belum banyak diteliti sebelumnya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih relevan dan efektif, serta menawarkan solusi praktis yang berbasis pada realitas dan kebutuhan daerah perbatasan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur di daerah perbatasan dengan mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan solusi yang dapat meningkatkan keberhasilan kebijakan tersebut.



METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk menggali secara mendalam implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur di daerah perbatasan. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami secara lebih rinci tentang tantangan dan dinamika yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan di wilayah dengan kondisi geografis dan sosial yang khas. Studi kasus akan digunakan untuk mengkaji implementasi kebijakan di beberapa daerah perbatasan yang menjadi fokus penelitian, guna mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai efektivitas kebijakan dalam konteks yang lebih spesifik.

Metode pengumpulan data utama dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam, yang akan dilakukan dengan berbagai pihak terkait, seperti pejabat pemerintah, pelaksana proyek, dan masyarakat setempat. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh perspektif dari masing-masing kelompok mengenai tantangan yang mereka hadapi serta sejauh mana kebijakan pembangunan infrastruktur berhasil diterapkan. Wawancara semi-terstruktur akan digunakan untuk memungkinkan fleksibilitas dalam penggalian informasi yang lebih mendalam terkait pengalaman dan persepsi mereka terhadap kebijakan yang diterapkan. Selain itu, observasi lapangan akan dilakukan untuk melihat kondisi fisik infrastruktur yang ada dan untuk menilai sejauh mana kebijakan tersebut berhasil dalam meningkatkan kualitas infrastruktur di daerah perbatasan.

Studi dokumentasi juga akan dilakukan dengan mengkaji berbagai dokumen yang relevan, seperti kebijakan perencanaan pembangunan infrastruktur, laporan pelaksanaan proyek, serta data statistik dan laporan keuangan yang berkaitan dengan anggaran yang dialokasikan. Hal ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai perencanaan dan pelaksanaan kebijakan infrastruktur di daerah perbatasan. Selanjutnya, data yang terkumpul dari wawancara, observasi, dan dokumentasi akan dianalisis menggunakan analisis tematik untuk mengidentifikasi tema-tema utama, seperti faktor penghambat dan solusi yang diusulkan dalam implementasi kebijakan. Melalui metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam dan rekomendasi yang aplikatif untuk meningkatkan efektivitas kebijakan pembangunan infrastruktur di daerah perbatasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Sebelum memasuki pembahasan hasil penelitian, penting untuk memahami bahwa efektivitas implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur di daerah perbatasan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Melalui pengumpulan data dari wawancara, observasi lapangan, dan studi dokumentasi, penelitian ini bertujuan untuk menggali permasalahan yang ada serta mencatat pencapaian yang telah diperoleh. Hasil dari penelitian ini akan memaparkan temuan-temuan utama yang mencakup kendala-kendala yang dihadapi, keberhasilan yang telah dicapai, serta solusi-solusi yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan pembangunan infrastruktur di daerah perbatasan.



Tabel 1: Faktor-faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur

Faktor Penghambat	Penjelasan
Keterbatasan Anggaran	Alokasi dana yang terbatas menghambat kelancaran proyek infrastruktur.
Kurangnya Koordinasi Antar Instansi	Terkadang terjadi kurangnya kerjasama antar pemerintah daerah dan pusat.
Keterbatasan Sumber Daya Manusia	Minimnya tenaga kerja yang terampil dan berkompeten di daerah perbatasan.
Tantangan Geografis	Akses yang sulit ke daerah-daerah tertentu karena kondisi geografis yang ekstrem.
Hambatan Sosial dan Budaya	Ketidacocokan kebijakan dengan budaya lokal dapat menyebabkan resistensi.

Tabel 1 menggambarkan berbagai faktor yang menghambat pelaksanaan kebijakan pembangunan infrastruktur di daerah perbatasan. Keterbatasan anggaran menjadi salah satu penghambat utama, di mana dana yang terbatas tidak mencukupi untuk pelaksanaan proyek yang luas dan komprehensif. Selain itu, kurangnya koordinasi antar instansi pemerintah, baik di tingkat daerah maupun pusat, memperburuk efektivitas implementasi. Kendala geografis dan sosial juga memainkan peran besar dalam kesulitan akses ke daerah-daerah terpencil, sementara hambatan budaya dapat menyebabkan resistensi terhadap kebijakan yang dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai lokal. Identifikasi faktor-faktor ini penting agar kebijakan yang lebih efektif dan tepat sasaran dapat dirancang.

Tabel 2: Keberhasilan yang Dicapai dalam Pembangunan Infrastruktur

Jenis Infrastruktur	Keberhasilan yang Dicapai	Dampak pada Masyarakat
Transportasi (Jalan, Jembatan)	Peningkatan aksesibilitas antar desa dan daerah perbatasan.	Meningkatkan mobilitas masyarakat dan distribusi barang.
Energi (Listrik)	Pembangunan fasilitas energi baru yang lebih merata.	Meningkatkan kualitas hidup dengan akses listrik yang lebih stabil.
Telekomunikasi	Penyediaan jaringan internet dan komunikasi yang lebih luas.	Mempermudah komunikasi antar daerah dan meningkatkan akses informasi.
Air Bersih	Pembangunan instalasi air bersih di beberapa daerah.	Meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup masyarakat.

Tabel 2 ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat berbagai tantangan, kebijakan pembangunan infrastruktur di daerah perbatasan telah mencapai beberapa hasil yang signifikan. Pembangunan infrastruktur transportasi, seperti jalan dan jembatan, telah meningkatkan aksesibilitas antar daerah, yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan distribusi barang. Infrastruktur energi, terutama listrik, memberikan akses yang lebih merata dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan fasilitas yang lebih stabil. Selain itu, penyediaan jaringan telekomunikasi dan air bersih membantu memperbaiki kualitas hidup serta memperlancar komunikasi dan kesehatan masyarakat. Keberhasilan ini menyoroti pentingnya infrastruktur dasar dalam meningkatkan kesejahteraan di daerah perbatasan.

**Tabel 3: Solusi untuk Meningkatkan Keberhasilan Implementasi Kebijakan**

Solusi yang Diusulkan	Penjelasan
Peningkatan Koordinasi Antar Instansi	Meningkatkan komunikasi dan kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah.
Alokasi Anggaran yang Lebih Efektif	Meningkatkan distribusi dana agar lebih tepat sasaran dan efisien.
Pelatihan Sumber Daya Manusia	Menyediakan program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokal.
Pendekatan Sensitif Budaya	Menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan dan nilai-nilai budaya lokal.

Tabel 3 ini merangkum beberapa solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi kendala dalam pembangunan infrastruktur di daerah perbatasan. Peningkatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan dapat diimplementasikan secara lebih efektif. Dengan alokasi anggaran yang lebih efisien dan tepat sasaran, pelaksanaan proyek dapat berjalan lebih lancar. Selain itu, pelatihan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokal akan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, yang krusial untuk mendukung proyek-proyek pembangunan. Terakhir, penerapan kebijakan yang lebih sensitif terhadap kebutuhan budaya lokal akan meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap proyek-proyek tersebut, serta memastikan kebijakan yang diterapkan lebih sesuai dengan konteks lokal.

Pembahasan

Faktor penghambat implementasi kebijakan publik dalam pembangunan infrastruktur di daerah perbatasan sangat beragam dan kompleks (Khair and Assyahri 2024). Salah satu faktor utama yang sering ditemui adalah keterbatasan anggaran yang dialokasikan untuk proyek-proyek infrastruktur. Pemerintah pusat seringkali mengalami kesulitan dalam mendistribusikan anggaran yang memadai untuk wilayah perbatasan, karena alokasi dana yang terbatas dan prioritas pembangunan yang lebih besar di daerah pusat. Keterbatasan anggaran ini menyebabkan terhambatnya realisasi proyek-proyek infrastruktur yang seharusnya dapat meningkatkan aksesibilitas dan kualitas hidup masyarakat. Dalam banyak kasus, proyek pembangunan infrastruktur yang sudah direncanakan harus ditunda atau bahkan dihentikan karena kendala pendanaan, sehingga menyulitkan pencapaian tujuan pembangunan yang diinginkan.

Selain faktor anggaran, masalah koordinasi antar instansi pemerintah juga menjadi penghambat signifikan dalam implementasi kebijakan. Daerah perbatasan sering kali melibatkan berbagai lembaga pemerintahan, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun daerah, dalam pelaksanaan proyek pembangunan infrastruktur. Namun, koordinasi yang kurang baik antara lembaga-lembaga ini seringkali menimbulkan ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan di lapangan. Hal ini dapat menyebabkan tumpang tindih kewenangan, duplikasi upaya, serta kesulitan dalam pemantauan dan evaluasi proyek. Ketidakterpaduan dalam sistem pengelolaan proyek infrastruktur di daerah perbatasan menghambat kelancaran implementasi kebijakan (Hasibuan and Zulham 2025), yang pada akhirnya berdampak pada efektivitas pembangunan infrastruktur itu sendiri.



Kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang terampil dan berkualitas juga menjadi faktor penghambat utama dalam pelaksanaan kebijakan di daerah perbatasan (Rupinus, Arifin, and Akadira 2023). Sumber daya manusia yang terbatas, baik dalam hal jumlah maupun keterampilan teknis, menghambat efisiensi dan kualitas pelaksanaan proyek infrastruktur. Daerah perbatasan seringkali kesulitan dalam menarik tenaga kerja yang kompeten karena rendahnya daya tarik wilayah tersebut dibandingkan dengan daerah pusat yang lebih berkembang. Selain itu, keterampilan teknis yang diperlukan untuk mengelola proyek infrastruktur seperti konstruksi, pengelolaan sumber daya, dan pemeliharaan fasilitas juga seringkali tidak tersedia di tingkat lokal (Gusli, Iswantir, and Akhyar 2023). Akibatnya, proyek pembangunan infrastruktur sering kali mengalami keterlambatan dan kualitas yang kurang memadai, yang pada gilirannya mempengaruhi efektivitas kebijakan yang diterapkan.

Faktor geografis yang sulit dijangkau juga menjadi kendala signifikan dalam implementasi kebijakan di daerah perbatasan. Wilayah perbatasan, terutama yang terletak di daerah terpencil atau memiliki topografi yang sulit, sering kali menghadapi tantangan besar dalam hal aksesibilitas. Infrastruktur transportasi yang kurang memadai, seperti jalan yang rusak atau belum dibangun, menghambat pengiriman material, peralatan, dan tenaga kerja yang diperlukan untuk proyek pembangunan (Noviyanti and Putra 2023). Hal ini memperlambat proses pembangunan dan meningkatkan biaya operasional. Faktor geografis yang sulit dijangkau juga berisiko menambah ketergantungan pada anggaran tambahan untuk transportasi dan logistik, yang pada akhirnya dapat mengurangi efektivitas kebijakan pembangunan infrastruktur tersebut.

Selain faktor-faktor di atas, tantangan sosial budaya juga memainkan peran penting dalam menghambat implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur di daerah perbatasan. Masyarakat di daerah perbatasan sering kali memiliki pola hidup, budaya, dan nilai-nilai yang berbeda dengan daerah pusat (Yuniar and Rahmah 2024), yang dapat mempengaruhi respons mereka terhadap proyek pembangunan yang diusulkan. Perbedaan budaya, norma sosial, dan persepsi terhadap proyek infrastruktur bisa menimbulkan resistensi dari masyarakat lokal. Misalnya, pembangunan infrastruktur yang dianggap mengganggu cara hidup tradisional atau tidak sesuai dengan kebutuhan lokal dapat menemui penolakan. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang aspek sosial budaya masyarakat sangat penting agar kebijakan yang diterapkan dapat diterima dan diimplementasikan dengan lebih efektif di daerah perbatasan.

Secara keseluruhan, faktor-faktor penghambat implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur di daerah perbatasan saling terkait dan saling mempengaruhi. Keterbatasan anggaran, koordinasi yang buruk, kurangnya SDM terampil, tantangan geografis, serta faktor sosial budaya, semuanya berkontribusi terhadap kesulitan yang dihadapi dalam mencapai tujuan pembangunan infrastruktur di wilayah ini. Oleh karena itu, penting bagi pembuat kebijakan untuk memperhatikan dan mengatasi faktor-faktor penghambat ini agar kebijakan yang diterapkan dapat berjalan dengan lancar dan memberikan dampak yang maksimal bagi masyarakat di daerah perbatasan (Nastan and Amri 2024).

Pembangunan infrastruktur fisik seperti jalan, jembatan, dan fasilitas energi diharapkan dapat memberikan dampak signifikan terhadap mobilitas masyarakat serta meningkatkan konektivitas antara daerah perbatasan dan pusat-pusat ekonomi (Liem and Purwanto 2022). Jalan dan jembatan yang dibangun untuk menghubungkan daerah-daerah terpencil dengan wilayah yang lebih maju



bertujuan untuk meningkatkan efisiensi distribusi barang dan orang, yang pada gilirannya diharapkan dapat mendongkrak perekonomian lokal. Selain itu, analisis lebih lanjut akan dilakukan terkait sejauh mana infrastruktur yang dibangun mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, khususnya dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Keterbatasan infrastruktur di daerah perbatasan selama ini menjadi hambatan besar dalam akses terhadap layanan publik yang sangat vital. Pembangunan fasilitas transportasi dan energi yang memadai, seperti jalan yang lebih baik dan pasokan energi yang stabil, diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Aulia et al. 2024). Namun, efektivitas kebijakan ini perlu dianalisis lebih lanjut, terutama dalam hal aksesibilitas terhadap fasilitas pendidikan dan kesehatan yang masih sangat dibutuhkan. Dalam hal ini, penilaian terhadap apakah pembangunan infrastruktur sudah tepat sasaran dan sejalan dengan kebutuhan masyarakat menjadi hal yang sangat penting untuk memastikan keberlanjutan dan keberhasilan kebijakan tersebut.

Infrastruktur yang lebih baik memungkinkan terjadinya pergerakan barang dan jasa yang lebih efisien, membuka peluang bagi pengembangan sektor-sektor ekonomi lokal, seperti pertanian, perikanan, dan perdagangan antar daerah (Tambaip, Tjilen, and Ohoiwutun 2023). Salah satu tujuan utama dari kebijakan pembangunan infrastruktur adalah menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuhnya kegiatan ekonomi yang lebih produktif. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap dampak langsung dari pembangunan infrastruktur terhadap pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja baru, serta peningkatan daya saing produk-produk lokal di pasar.

Pembangunan infrastruktur yang mencakup peningkatan aksesibilitas antar daerah diharapkan dapat mengurangi isolasi sosial yang sering dialami oleh masyarakat di daerah perbatasan (Abdussamad et al. 2023). Infrastruktur yang lebih baik mempercepat pertukaran informasi dan meningkatkan interaksi antar masyarakat dari berbagai latar belakang sosial dan budaya. Interaksi ini berpotensi memperkuat kohesi sosial dan meningkatkan solidaritas antar daerah. Pembahasan ini akan mencakup sejauh mana pembangunan infrastruktur telah mengurangi kesenjangan sosial dan memperkuat hubungan sosial antara daerah perbatasan dengan daerah lainnya, serta dampaknya terhadap kesadaran sosial dan pembangunan identitas kolektif masyarakat.

Kebijakan pembangunan infrastruktur di daerah perbatasan umumnya bertujuan untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antara daerah pusat dan daerah terluar (Tupan and Setiorini 2022), serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Dengan membandingkan kondisi sebelum dan sesudah implementasi kebijakan, penelitian ini akan mengevaluasi apakah kebijakan tersebut telah mencapai tujuan yang ditetapkan dan memberikan dampak positif terhadap kehidupan masyarakat. Pembahasan ini akan memberikan wawasan terkait efektivitas kebijakan, serta memberikan rekomendasi untuk langkah-langkah kebijakan yang lebih tepat guna dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas implementasi pembangunan infrastruktur di daerah perbatasan.

Pembahasan solusi yang diajukan dalam penelitian ini difokuskan pada cara-cara yang dapat mengatasi hambatan-hambatan yang ditemukan dalam implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur di daerah perbatasan. Salah satu solusi utama yang diidentifikasi adalah peningkatan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Di banyak kasus, kendala koordinasi antar lembaga menyebabkan ketidaksesuaian antara perencanaan kebijakan dan pelaksanaannya di



lapangan. Oleh karena itu, peningkatan komunikasi dan kerja sama antara tingkat pemerintah yang berbeda sangat penting untuk memastikan kebijakan dapat diterjemahkan dengan lebih efektif (Siahaya et al. 2024). Koordinasi ini tidak hanya melibatkan lembaga pemerintahan, tetapi juga masyarakat lokal dan sektor swasta, yang perlu bekerja sama untuk meminimalisir hambatan dalam proses implementasi.

Selain itu, pengelolaan anggaran yang lebih efisien juga menjadi salah satu solusi yang sangat dibutuhkan. Banyaknya kendala terkait dengan keterbatasan anggaran sering kali menyebabkan terbatasnya cakupan proyek pembangunan infrastruktur di daerah perbatasan. Solusi yang diajukan adalah dengan melakukan perencanaan anggaran yang lebih realistis, dengan prioritas yang jelas untuk pembangunan infrastruktur yang memiliki dampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Pemerintah diharapkan dapat memanfaatkan anggaran yang ada dengan lebih efektif, seperti melalui alokasi anggaran yang lebih terfokus pada proyek-proyek prioritas dan mengurangi pemborosan di sektor-sektor yang tidak mendesak. Implementasi manajemen anggaran yang transparan dan akuntabel juga sangat penting untuk memastikan anggaran yang terbatas dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya (Syukri et al. 2024).

Pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga merupakan solusi yang tidak kalah penting. Keterbatasan jumlah dan kualitas tenaga kerja yang terampil menjadi salah satu penghambat dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di daerah perbatasan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan instansi terkait untuk menyediakan pelatihan teknis yang memadai, tidak hanya untuk aparat pemerintah, tetapi juga untuk tenaga kerja lokal. Pengembangan kapasitas ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas pelaksanaan proyek infrastruktur, tetapi juga memberikan manfaat jangka panjang dalam hal peningkatan kemampuan masyarakat lokal untuk mengelola dan merawat infrastruktur yang ada. Pelatihan berbasis kebutuhan lokal dan partisipasi aktif masyarakat akan meningkatkan keberlanjutan proyek infrastruktur tersebut.

Selain solusi terkait anggaran dan sumber daya manusia, strategi yang lebih sensitif terhadap kondisi geografis dan sosial budaya masyarakat juga perlu diperhatikan. Kondisi daerah perbatasan yang memiliki tantangan geografis yang sulit diakses serta keragaman budaya masyarakat setempat sering kali diabaikan dalam perencanaan kebijakan. Oleh karena itu, solusi yang diajukan mencakup perlunya penyesuaian desain kebijakan yang mempertimbangkan kondisi spesifik daerah tersebut, seperti penggunaan teknologi yang dapat mempermudah aksesibilitas, serta pengembangan infrastruktur yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Dalam hal ini, pendekatan berbasis komunitas menjadi kunci, di mana masyarakat dilibatkan dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan infrastruktur, memastikan bahwa kebutuhan mereka tercermin dalam kebijakan yang diambil.

Terakhir, kebijakan berbasis komunitas yang lebih efektif dan berkelanjutan perlu diperkenalkan sebagai bagian dari solusi yang diajukan. Dalam konteks pembangunan infrastruktur di daerah perbatasan, keterlibatan aktif masyarakat lokal sangat krusial untuk memastikan bahwa kebijakan yang diimplementasikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal. Pendekatan berbasis komunitas juga memastikan bahwa keberlanjutan pembangunan dapat tercapai, dengan memberikan peran serta masyarakat dalam merencanakan, membangun, dan memelihara infrastruktur tersebut. Dengan memberdayakan masyarakat lokal, kebijakan pembangunan tidak hanya akan lebih tepat sasaran tetapi juga lebih tahan terhadap perubahan dan



tantangan yang mungkin muncul di masa depan. Inilah yang diharapkan dapat mengurangi ketimpangan pembangunan antara daerah perbatasan dan daerah pusat, serta menciptakan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Implikasi kebijakan yang dapat diambil berdasarkan temuan penelitian ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih terintegrasi dan berbasis kebutuhan lokal dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan infrastruktur di daerah perbatasan. Rekomendasi yang diusulkan mencakup peningkatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, pengelolaan anggaran yang lebih efisien, serta pemberdayaan masyarakat lokal melalui pelatihan dan partisipasi aktif dalam setiap tahap pembangunan. Berdasarkan teori-teori kebijakan publik seperti teori desentralisasi dan partisipasi masyarakat, kebijakan yang lebih inklusif dan adaptif akan menghasilkan pembangunan yang lebih berkelanjutan. Selain itu, praktik terbaik yang telah diterapkan di negara lain dengan kondisi serupa, seperti penerapan teknologi tepat guna dan pendekatan berbasis komunitas, dapat menjadi referensi yang berguna untuk merancang kebijakan yang lebih efektif dan sesuai dengan kondisi geografis serta sosial budaya daerah perbatasan. Dengan demikian, kebijakan yang diambil harus berfokus pada efisiensi, transparansi, dan keberlanjutan untuk memastikan dampak positif yang optimal bagi masyarakat.

KESIMPULAN

Implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur di daerah perbatasan menghadapi berbagai tantangan yang signifikan, yang menghambat efektivitas pelaksanaannya. Faktor-faktor penghambat utama yang ditemukan dalam penelitian ini meliputi keterbatasan anggaran, kurangnya koordinasi antara instansi terkait, serta terbatasnya kapasitas sumber daya manusia yang terampil dan terlatih. Selain itu, tantangan geografis yang sulit dijangkau dan hambatan sosial budaya turut memperburuk proses implementasi kebijakan tersebut. Meskipun demikian, meskipun terdapat kendala yang signifikan, beberapa pencapaian positif tetap terlihat, terutama dalam pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan fasilitas energi yang berhasil meningkatkan aksesibilitas dan kualitas hidup masyarakat setempat. Namun, hasil penelitian juga mengindikasikan adanya kesenjangan antara perencanaan kebijakan dan implementasi di lapangan. Beberapa kebijakan yang dirancang untuk memperbaiki kondisi infrastruktur di daerah perbatasan seringkali tidak dapat dilaksanakan secara optimal karena berbagai faktor, seperti kurangnya dukungan anggaran yang memadai, serta ketidakmampuan dalam menyesuaikan kebijakan dengan kondisi geografis dan sosial budaya yang ada. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah perbaikan yang lebih terarah, seperti peningkatan koordinasi antar instansi pemerintah, efisiensi dalam pengelolaan anggaran, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia lokal agar kebijakan dapat dilaksanakan secara lebih efektif. Penelitian ini menyarankan agar pengambil kebijakan merumuskan strategi yang lebih inklusif dan berbasis pada konteks lokal dalam merancang kebijakan pembangunan infrastruktur di daerah perbatasan. Kebijakan yang lebih sensitif terhadap kondisi sosial, budaya, dan geografis masyarakat setempat, serta pendekatan yang mengutamakan partisipasi masyarakat, diyakini dapat meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan tersebut. Dengan pendekatan yang lebih holistik dan keberpihakan pada pembangunan yang berkelanjutan, diharapkan dapat tercipta integrasi yang lebih baik antara daerah perbatasan dengan pusat, yang pada gilirannya akan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat dan memperkuat stabilitas sosial dan ekonomi di daerah perbatasan.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abdussamad, Zamroni, Apripari Apripari, Mohamad Hidayat Muhtar, Ahmad Ahmad, Dolot Alhasni Bakung, and Suwitno Yutye Imran. 2023. "Pendekatan Cultural Studies Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Boalemo." *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4(6):11518–26.
- Aulia, Septiana, Sabrina Nur Anisa, Afreizka Indah, M. Arif Krui Dipa, and Maya Panorama. 2024. "Analisis Peran Infrastruktur Dalam Pertumbuhan Ekonomi Pembangunan Di Kota Palembang." *Jurnal Publikasi Ekonomi Dan Akuntansi (JUPEA)* 4(1).
- Gusli, Ramadhoni Aulia, M. Iswantir, and Muaddyl Akhyar. 2023. "Konsep Manajemen Sarana Dan Prasarana Pendidikan Lembaga Islam Di Mts S Sungai Rambah Kabupaten Padang Pariaman." *Jurnal Bilqolam Pendidikan Islam* 4(2):61–78.
- Hasibuan, Irfan Effendi, and Zulham Zulham. 2025. "Analisis Hukum Ekonomi Terhadap Kebijakan Angkutan Umum Di Kota Medan; Perspektif Al-Maslahah." *Al-Muamalat: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 10(1):1–14.
- Khair, Vallensia Mizatul, and Wahib Assyahri. 2024. "Optimalisasi Administrasi Pertanahan Di Indonesia: Tantangan Dan Strategi Menuju Kepastian Hukum." *Journal of Public Administration and Management Studies* 2(2):55–62.
- Lase, Delipiter, Eliyunus Waruwu, Helmin Parida Zebua, and Ayler Beniah Ndraha. 2024. "Peran Inovasi Dalam Pembangunan Ekonomi Dan Pendidikan Menuju Visi Indonesia Maju 2045." *Tuhenori: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2(2):114–29.
- Liem, Yoseph, and L. M. F. Purwanto. 2022. "Rencana Pemandangan Bandar Udara Eltari Kupang Strategi Perencanaan Kota Berkelanjutan." *Jurnal Lingkungan Karya Arsitektur* 1(1):1–15.
- Nastan, Ari Yudha Fadhilah, and Syaiful Amri. 2024. "Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Mengenai Batas Kecepatan Kendaraan Dijalan Tol Perspektif Fiqh Siyasah." *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6(1):890–903.
- Noviyanti, Noviyanti, and Ilham Mirzaya Putra. 2023. "Dampak Perbaikan Jalan Terhadap Kondisi Social Ekonomi Masyarakat Desa Klumpang Kebun Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang." *Jurnal Darma Agung* 31(3):178–97.
- Nursyahrani, Annisa, Herli Andani, Masliatul Aini, and Reihan Afriyandi. 2025. "Pembangunan Berbasis Sektor: Studi Perbandingan Indonesia Dan Malaysia Dalam Ekonomi, Pendidikan, Infrastruktur Dan Kesehatan." *Karimah Tauhid* 4(1).
- Rupinus, Rupinus, Arifin Arifin, and Tora Akadira. 2023. "Implementasi Kebijakan Wajib Belajar Sembilan Tahun Di Kecamatan Dedai Kabupaten Sintang." *VOX EDUKASI: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 14(2):301–10.
- Siahaya, Vegel Victory, Arie Mathea Andes, Janesandre Palilingan, Sebril Johanis Polii, Nita Cicilia Ganap, and Pingkan Dewi Kaunang. 2024. "Hambatan Koordinasi Antarinstansi Dalam Penegakan Hukum Keimigrasian Di Kota Bitung: Tantangan Dan Langkah-Langkah Perbaikannya." *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 5(3):813–25.
- Syukri, Makmur, Sri Melisawati, Desi Fatma, and Reni Renanda. 2024. "Manajemen Pembiayaan Pendidikan Terhadap Mutu Pendidikan Dasar." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10(18):605–17.
- Tambaip, Beatus, Alexander Phuk Tjilen, and Yosephina Ohoiwutun. 2023. "Kebijakan



- Pengembangan Infrastruktur Dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Merauke.” *PARETO: Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik* 6(1):97–106.
- Tupan, Tupan, and Retno Asihanti Setiorini. 2022. “Narative Review Konten Publikasi Implementasi Kebijakan Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Di Wilayah Perbatasan.” *Shaut Al-Maktabah: Jurnal Perpustakaan, Arsip Dan Dokumentasi* 14(1):39–49.
- Yuniar, Ririt, and Imania Rahmah. 2024. “Potret Masyarakat Perbatasan Papua: Interaksi, Dan Penguatan Nilai-Nilai Kebangsaan Analisis Komunikasi.” *Jurnal Ilmu Komunikasi* 21(3):431–45.
- Zulhija, Shela Rahmat, and Benardin Benardin. 2025. “PENGARUH INFRASTRUKTUR PUBLIK TERHADAP PDRB PER KAPITA TAHUN 2013-2022.” *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)* 9(1):603–28.